

Papuan Nationalism Within the Framework of Indonesian Nationalism

Nasionalisme Bangsa Papua dalam Bingkai Keindonesiaan

Ani Widayani Soetjipto & Muhammad Iqbal Yunazwardi
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Kekerasan, diskriminasi, dan rasisme masih menjadi isu besar yang dihadapi masyarakat Papua sejak Indonesia merdeka dan bergabungnya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Analisis fenomena ini dapat ditarik ke berbagai macam aspek. Salah satu aspek penting yang menentukan eksistensi sebuah negara adalah aspek nasionalisme. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi nasionalisme Papua tetap hadir dan hidup, sekalipun nasionalisme Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam menjaga pilar berbangsa dan bernegara Indonesia. Tulisan ini berusaha mendiskusikan kembali bagaimana posisi nasionalisme Indonesia terhadap masyarakat Papua dan sebaliknya. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, apakah identitas bangsa Papua merupakan bagian dari identitas kebangsaan Indonesia? atau kepulauan justru bagian yang terpisah dari nasionalisme Indonesia? Dengan menggunakan pisau analisis nasionalisme dari Indonesianis Benedict Anderson, artikel ini membahas bagaimana diskursus nasionalisme yang berkembang mampu menjawab tantangan nasionalisme ganda yang terjadi di Indonesia dalam isu Papua. Upaya ini juga akan mempertegas pertanyaan penting dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah membangun ide Papua dalam kerangka nasionalisme Indonesia.

Kata-kata kunci: *Nasionalisme Indonesia, Nasionalisme Papua, Benedict Anderson, Nasionalisme, identitas*

Violence, discrimination and racism have remained to be major issues faced by Papuans ever since the independence of Indonesia and the inclusion of Papua in Indonesia's territory until today. This phenomenon can be seen through various aspects. One of those is the determinant aspect of a country's existence: nationalism. Within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia, the existence of Papuan nationalism is undeniably still present and alive, even though Indonesian nationalism is the central one in maintaining the pillars of the Indonesian nation and state. This article discusses how Indonesian nationalism positions Papuan people, and vice versa. Furthermore, this article questions whether the Papuan identity is a part of Indonesia's. The discussion of this article focuses on the developing nationalism discourse, in the hope to overcome the 'double-nationalism' in Indonesia when it comes to Papua's issue, by using Benedict Anderson's concept of nationalism. Finally, this article addresses a crucial question, which is how to develop the Papuan idea within the framework of Indonesian nationalism.

Keywords: *Indonesian Nationalism, Papuan Nationalism, Benedict Anderson, Nationalism, identity*

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari aspek kedaulatan. Nasionalisme berkembang di Eropa sekitar pertengahan abad ke-17 sebagai konsekuensi diterapkannya perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia menekankan arti penting lahirnya negara-bangsa dengan segala aspek yang harus dimiliki. Sering kali, upaya mengidentifikasi semangat pembentukan negara-bangsa dilakukan dengan cara mengidentifikasi wilayah yang didiami sebuah komunitas politik (Breuilly 2014). Bangkitnya nasionalisme dari akhir abad ke-18 menasionalisasi tatanan negara, meluas dari Eropa hingga seluruh dunia dan diorganisasikan sebagai serangkaian negara-bangsa. Hubungan internasional menjadi hubungan antara negara-bangsa. Akan tetapi dalam perkembangannya, globalisasi mengubah tatanan politik ini dengan mengikis kekuatan teritorial yang berdaulat dan identitas nasional. Kajian lebih lanjut mengenai nasionalisme maupun kewarganegaraan ganda pada dasarnya menantang masyarakat untuk memikirkan kembali konsep paling mendasar dalam teori HI maupun politik tradisional, yaitu negara berdaulat, teritorial, negara bangsa hingga teori kontrak sosial. Selain itu, kewarganegaraan ganda memberikan kesempatan untuk merenungkan hubungan antara globalisasi dan negara-bangsa (Kang 2020).

Nasionalisme adalah gagasan bahwa keanggotaan bangsa memberikan fokus utama pada identitas politik dan kesetiaan, yang pada gilirannya menuntut *self-determination* (Breuilly 2014). Nasionalisme memahami arti bangsa dengan cara yang berbeda, meskipun mereka semua menganggapnya merujuk pada seluruh masyarakat yang menempati wilayah tertentu. Akan tetapi, kesamaan masyarakat atau wilayah sering kali bisa diklaim oleh berbagai kelompok nasionalis yang berkompetisi (Breuilly 2014). Hal ini terjadi di Indonesia. Nasionalis Indonesia mengakui bahwa wilayah Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Akan tetapi, klaim tersebut tidak bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat Papua, terutama bagi mereka martir nasionalisme Papua atau gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan Papua.

Indonesia sebagai negara bangsa digambarkan sebagai proyek yang sudah selesai dan final sehingga ada ungkapan NKRI harga

mati. Gagasan tentang kebangsaan dimaknai secara sakral dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, tuduhan makar, separatisme, hingga tidak nasionalis bisa saja dilekatkan oleh pemerintah kepada individu yang ingin menawarkan gagasan menyempurnakan gagasan kebangsaan Indonesia.

Indonesia dan Papua seharusnya bisa berkembang seiring dan bisa saling tumbuh bersama dan saling mewarnai ke arah kemajuan yang sama-sama positif untuk keduanya. Indonesia dan Papua berada dalam satu bingkai kebangsaan yang saling mewarnai dan tidak pernah bersifat final karena terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan jaman. Sejarah Indonesia modern juga dibentuk dan diwarnai oleh anak-anak Papua sebagaimana sejarah Indonesia juga membentuk dan mewarnai mozaik yang mewarnai perkembangan di Papua. Keindonesiaan dan kepapuaan tidak seharusnya saling menegasikan.

Tidak ada ungkapan NKRI harga mati seperti juga tidak ada ungkapan merdeka harga mati untuk saudara-saudara kita di Papua yang sekarang berjuang ke arah kemerdekaan Papua di tingkat internasional. Dukungan kemerdekaan di tingkat internasional tersebut bahkan telah ditunjukkan oleh negara, semisal beberapa negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Salah satu negara anggota MSG, Vanuatu memperlihatkan dukungannya bagi pemisahan Papua dari Indonesia. Dukungan tersebut diberikan karena didorong oleh sentimen etnis yang diarahkan untuk mendukung setiap kemerdekaan negara etnis Melanesian (Wardhani 2015).

Pembahasan mengenai nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia saat ini menjadi semakin menarik dan penting di tengah fenomena kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua. Pemaknaan tentang identitas kepapuaan banyak memunculkan perdebatan dan pertanyaan. *Puzzle* yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah apakah identitas bangsa Papua merupakan bagian dari identitas kebangsaan Indonesia? atau kepapuaan justru bagian yang terpisah dari nasionalisme Indonesia?

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis pertanyaan tersebut adalah konsep nasionalisme dalam tulisan Benedict Anderson “*imagined communities*”. Menurut Anderson (1992, 4-6) nasionalisme adalah sebuah bentukan, alih-alih sebuah proses natural yang melingkupi seluruh orang atau anggota pada suatu batas-batas yang ditentukan yang bersumber dari kesamaan sejarah. Dengan demikian, aspek nasionalisme yang dibahas oleh Anderson adalah: (1) Komunitas dengan *deep horizontal comradeship*; (2) Terbatas pada orang-orang tertentu dalam satu wilayah; dan (3) Ditentukan dalam kesamaan sejarah. Pemikiran Anderson menyempurnakan pemikiran sebelumnya yang telah disampaikan oleh Ernest Renan (1882) dan Otto Bauer (2000).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan studi dokumen yang intensif. Lewat studi dokumen yang intensif, dibahas perdebatan yang mendalam tentang bagaimana nasionalisme Indonesia dibangun dan bagaimana menempatkan Papua dalam kerangka bangunan nasionalisme Indonesia tersebut. Tulisan ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama membahas pembentukan identitas kebangsaan Indonesia melalui pemikiran Ernest Renan, Otto Bauer, dan Ben Anderson. Bagian kedua membahas bagaimana memaknai identitas kepapuaan. Bagaimana identitas kepapuaan tersebut jika diabstraksikan dalam spektrum teori tentang nasionalisme. Bagian ketiga adalah analisis dan diskusi bagaimana gagasan kepapuaan dan keindonesiaan saling berkelindan, apakah saling menguatkan atau saling menegasikan?

Identitas Kebangsaan Indonesia

Ernest Renan dan Otto Bauer adalah pemikir nasionalisme yang memfokuskan diri pada faktor individu atau manusia. Renan fokus membahas nasionalisme sebagai keinginan untuk bersatu (Renan 1882). Sedangkan Otto Bauer melihat bahwa nasionalisme terjadi dikarenakan kesamaan nasib (Bauer 2000). Akar dari dua pemikiran tersebut adalah bahwa sebuah komunitas politik dapat menciptakan sebuah bangsa tanpa harus berakar dari bentuk kesamaan etnis atau identitas tertentu. Variabel-variabel seperti bahasa, agama, budaya tidak menjadi perhatian utama kedua

pemikir tersebut karena sejatinya nasionalisme tercipta karena ada tekanan dan keinginan bersama.

Soekarno mengapitalisasi ide Renan dan Bauer untuk mendefinisikan kembali nasionalisme versi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberikan sebuah pidato berjudul «Dasar (Beginisel) Negara Kita» di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Dalam pidato tersebut, Soekarno menggunakan dua gagasan pemikir di atas untuk menguatkan argumentasinya perihal kebangsaan sebagai dasar pertama dalam pembangunan negara Indonesia (*Nationale Staat!*). Berikut adalah pernyataan yang diungkapkan oleh Soekarno:

“Menurut Renan syarat bangsa ialah ‘kehendak akan bersatu’. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernst Renan menyebut syarat bangsa: ‘le desir d’être ensemble’, yaitu kehendak bersatu. Definisi orang lain, yaitu Otto Bauer, di dalam bukunya ‘Die Nationalitätenfrage’, di situ ditanyakan: ‘Was ist eine Nation?’ dan jawabnya ialah ‘Eine Nation ist eine aus chksals-gemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib)” (Soekarno 1945).

Menurut Soekarno, dua pemikiran tersebut membuktikan bahwa dalam sebuah pembangunan negara, masyarakatnya harus disatukan oleh narasi-narasi yang sama, yaitu memiliki kesamaan nasib. Akan tetapi dalam pidato tersebut, Soekarno mengkritik pemikiran Renan dan Bauer yang hanya melihat individu. Dalam pidato tersebut, Soekarno berkata:

“Mereka hanya memikirkan ‘Gemeinschaft’-nya, dan perasaan orangnya, ‘l’âme et desir’. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air adalah satu kesatuan.” (Soekarno 1945)

Tetapi pada kutipan selanjutnya, Soekarno juga menekankan pentingnya menyamakan persepsi mengenai tanah air. Tanah air menurut Soekarno ialah Indonesia. Secara geopolitik, Indonesia adalah Sabang sampai Merauke. Walau pada pidato

tersebut, Soekarno hanya menyebutkan nama-nama pulau tertentu. Definisi Bauer dan Renan dirasa kurang bagi Soekarno karena tidak mampu menjelaskan tanah air secara utuh. Melalui pidato tersebut, Soekarno juga menegaskan bahwa manusia dan tempatnya sebagai satu kesatuan utuh yang tidak dipisahkan. Dampak dari definisi ini adalah bahwa manusia yang hidup dari Sabang sampai Merauke adalah manusia telah terikat dalam sebuah bangsa bernama bangsa Indonesia. Pada akhirnya, keterkaitan pemikiran Renan dan Bauer memiliki peran yang penting dalam pembentukan nasionalisme Indonesia. Tidak hanya sekedar disinggung Soekarno dalam pidato tersebut, pidato ini juga menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.

Menurut penulis, definisi tanah air yang dimaksud oleh Soekarno dapat diwadahi oleh pemikiran nasionalisme yang dimiliki oleh Benedict Anderson. Dalam bukunya *Imagined Community*, Anderson mendefinisikan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan, imajinasi tersebut dibayangkan secara terbatas dan berdaulat (Anderson 1992, 5). Bangsa dibayangkan karena individu dalam kelompok atau negara terkecil tidak pernah mengenal, bertemu atau mendengar satu sama lain. Bangsa dibayangkan sebagai terbatas karena sekalipun mereka mampu hidup dengan kelompok yang besar, mereka tetap memiliki batas yang membedakannya dengan bangsa lainnya. Selain itu, bangsa juga berdaulat karena masyarakatnya mampu untuk mandiri atas kekuasaan yang dimiliki. Dalam definisi berdaulat ini, tanah air menjadi sebuah objek tempat di mana kekuasaan terletak pada masyarakat Indonesia itu sendiri.

Menarik kesimpulan dari pemikiran Anderson, nasionalisme Indonesia muncul ketika, di wilayah fisik tertentu, penduduk mulai merasa bahwa mereka memiliki nasib yang sama, masa depan yang sama. Oleh karena itu, terjadi perubahan orientasi berserikat yang dulunya terbagi atas kedaerahan (*Jong Java, Jons Minahasa, Jong Islamieten Bond*) menjadi sebuah kesatuan. Nasionalisme Indonesia hadir sebagai proyek bersama atas dasar pembebasan terhadap kolonialisme. Jika nasionalisme adalah proyek bersama, maka di masa depan, pemenuhannya tidak akan pernah selesai (Anderson 1999). Oleh karena itu, setiap generasi harus memperjuangkannya. Nasionalisme Indonesia sangat

bergantung pada semangat warga negara yang siap menysisihkan ambisi pribadi untuk menciptakan loyalitas gagasan besar atas nasionalisme Indonesia.

Memaknai Identitas Kepapuaan

“Saya serukan kepada seluruh rakyat Papua agar menaikkan bendera Papua (bintang kejora) secara serempak di seluruh tanah Papua, 1 Desember 1999.” (Eluay 1999)

“Indonesias have never given Papuan a proper place, because indeed they are Indonesias and we are Papuans. We are murdered, enslaved and colonized by Indonesian. In another 10 years time Papuas will be finished, murdered by Indonesians military. Because of that it is better that we just be independent.” (Giay 2000)

“Pak presiden kami bilang separatisme ini tidak turun dari langit, sama seperti separatisme dan nasionalisme Soekarno dan Mohammad Hatta. Mereka melawan karena mereka melihat ketidakadilan selama dua abad lebih ‘... Jadi separatisme ini selalu lahir sebagai reaksi terhadap perlakuan yang tidak adil dalam suatu konteks sejarah” (Giay dalam Norotouw 2012)

Beberapa penulis telah menulis masalah nasionalisme Papua di antaranya Chauvel (2005) dan Drooglever (2010). Richard Chauvel dalam tulisannya *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaptation* menyatakan bahwa wacana tentang nasionalisme Papua berkaitan erat dengan proses kesadaran sejarah orang Papua, terutama sejarah integrasi Papua lewat proses *act of free choice* (Pepera) serta ditentukan oleh kondisi politik kontemporer Indonesia dan bagaimana orang Papua menginterpretasikan kondisi politik tersebut. Secara ringkas Chauvel (2005) menyatakan terdapat “*dual nationalism*” (nasionalisme ganda) yakni yang dilakukan oleh Belanda di lapisan atas dan oleh Indonesia di lapisan bawah. Chauvel cenderung menyatakan bahwa peran Indonesia yang memicu bangkitnya nasionalisme di Papua

Penjelasan ini berbeda dengan Panders (2002) yang menyatakan nasionalisme Papua memiliki sejarah panjang mulai dari gerakan mesianistik atau *cargo cult* antiamberi atau karori untuk merespon administrasi pemerintahan kolonial Belanda maupun pendudukan Jepang di wilayah Papua. Karori maknanya adalah melakukan upacara magis menari semalam suntuk menantikan kedatangan sang karori atau konor yang membebaskan mereka dari penderitaan. Jadi nasionalisme awal Papua ini bukan dibentuk oleh Indonesia sebagai perlawanan terhadap Belanda seperti yang selama ini selalu disuarakan. *Cargo cult* adalah respon Papua dalam interaksinya dengan tetangganya di Maluku dan Melayu serta nilai Kristen yang kemudian membentuk dialektika. Ada elemen mitologi dalam nasionalisme awal ini. Drooglever (2009) yang karyanya banyak dirujuk tentang sejarah Papua dalam buku *An Act Of Free Choice: Decolonization And The Right To Self Determination In West Papua* menyimpulkan bahwa sampai Perang Dunia Kedua, nasionalisme Indonesia belum menyentuh orang Papua dan sesudah Perang Dunia Kedua tidak ada gerakan nasionalisme Indonesia di antara orang Papua yang anti-Belanda.

Perasaan sebagai bangsa dipicu ketika pemerintah kolonial Belanda membangkitkan kesadaran nasionalis dengan pembentukan partai sebagai persiapan sebelum terjadinya transfer kekuasaan dari Belanda ke Indonesia. Pembentukan partai politik berjalan seiring dengan persiapan pembentukan birokrat lokal yang nantinya akan menjalankan pemerintahan di Papua setelah transfer kekuasaan Belanda. Sekolah Van Eechoud menghasilkan tokoh-tokoh awal seperti Frans Kaisiepo, Nicolas Jouwe, Silas Papare, Lukas Runkorem, Abdulah Arfan, Johan Arks, dan seterusnya. Beberapa nama ini membentuk partai politik dengan sikap berbeda terhadap Belanda dan Indonesia (Drooglever 2009)

Bernarda Meteray (2012) dalam karyanya *Nasionalisme Ganda Orang Papua* melengkapi beragam studi tentang nasionalisme Papua. Dalam studinya, Meteray (2012) menyatakan bahwa identitas kepapuaan muncul lebih dulu di kalangan orang Papua daripada identitas keindonesiaan. Identitas kepapuaan embrionya sudah muncul sejak 1927 melalui pendidikan dan agama Kristen ketika anak Papua dari berbagai wilayah disekolahkan di Merauke dan disponsori pastor beragama Kristen. Meteray menyatakan

pengaruh Indonesia tidak dirasakan sampai tahun 1963 ketika Perjanjian New York memutuskan Papua adalah bagian dari Indonesia.

Karakteristik dari memaknai kepapuaan (kami bangsa Papua) adalah ras kulit hitam, rambut keriting dan mempunyai bendera bintang kejora, memiliki simbol burung Mambruk/ Cendrawasih serta memiliki wilayah yang sekarang meliputi Papua dan Papua Barat. Proses kepapuaan terbangun hingga menjelang proses jajak pendapat di tahun 1961. Pengalaman bersama sebagai bangsa yang dirasakan mengikat mereka adalah pengalaman dibawah pengaruh Sultan Tidore yang memiliki pengaruh luas sampai ke raja 4 (Papua Barat). Penyemaian nasionalisme Papua juga dilakukan belanda sejak 1902 lewat pendidikan formal berpola agama yang diikuti pendirian partai politik dan dewan New Guinea. Proses penyemaian keindonesiaan dilakukan sejak 1945 tapi tidak dilakukan secara sistematis dan singkat serta terputus-putus (Meteray 2012)

Meteray (2012) menyimpulkan nasionalisme Papua berbasis pada ras Melanesia yang berkulit hitam dan berambut keriting. Nasionalisme Indonesia mengacu pada *Bhinneka Tunggal Ika* dan tidak mengacu pada ras tertentu. Selanjutnya Meteray menyatakan bahwa proses penyemaian nasionalisme Indonesia di Papua menempuh jalan berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Selama periode 1945-1962 Indonesia tidak memiliki kewenangan mengindonesiakan orang Papua secara terbuka karena itu proses penyemaian nasionalisme Indonesia menjadi tidak tuntas. Setelah tahun 1963, proses pengindonesiaan orang Papua dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan. Kesadaran orang Papua sebagai bagian dari Indonesia tidak mudah dan penerimaan konsep keindonesiaan juga tidak mudah. Oleh karena itu, kepapuaan telah hadir lebih dulu dari keindonesiaan

Interaksi Gagasan Keindonesiaan dan Kepapuaan

Nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua membangun sebuah perdebatan. Bukan hanya tentang nasionalisme siapakah

yang terlebih dulu hadir, tetapi juga memperdebatkan apakah nasionalisme Indonesia mampu mewadahi kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Dalam berbagai literatur sejarah, para pendiri bangsa Indonesia berusaha untuk menekankan pentingnya penggunaan paradigma nasionalisme modern dalam upaya membentuk nasionalisme Indonesia. Hal tersebut lahir dari konstruksi ide mengenai *Bhinneka Tunggal Ika*, sentimen anti kolonial, hingga upaya mengapitalisasi kesamaan nasib di antara masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Akan tetapi, apakah upaya pembentukan ide tersebut mampu untuk mewadahi kepentingan etnis Papua? Upaya sebagian masyarakat Papua dalam menuntut *self-determination* adalah fenomena nyata tentang tidak maksimalnya upaya elite dalam membangun ide nasionalisme Indonesia. Terdapat berbagai faktor penting untuk menjelaskan kondisi tersebut.

Setelah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, Indonesia dihadapkan pada masalah ketidakadilan pembangunan yang terjadi. Selama lebih dari 50 tahun bergabungnya Papua ke dalam Indonesia, masyarakat Papua tidak mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya. Sebaliknya, pemerintah pusat terus mengeruk sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Selain itu, pemerintah Indonesia dianggap tidak dapat menjamin keadilan rasial terhadap masyarakat etnis minoritas Papua. Masyarakat Papua yang hidup di berbagai daerah di Indonesia mengalami diskriminasi terhadap hak sosial politik dan ekonomi, tindakan rasisme, dan mengalami proses *othering* oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Fenomena tersebut menjadi faktor penting lahirnya nasionalisme etnis Papua, yaitu nasionalisme yang menuntut hadirnya perubahan mendasar terhadap kondisi masyarakat Papua yang tidak mendapatkan cukup hak yang sama dalam posisinya sebagai warga negara Indonesia.

Bagian ini membahas bagaimana perdebatan antara paradigma nasionalisme tradisional dengan paradigma nasionalisme modern. Perdebatan tersebut pada akhirnya melahirkan sebuah celah penting, yaitu bagaimana suatu negara mampu menjamin hak minoritas etnis. Dengan menggunakan perspektif poskolonial, bagian ini menjelaskan bagaimana pendekatan nasionalisme

tradisional dan nasionalisme modern gagal untuk menjelaskan posisi kelompok minoritas etnis dalam negara multietnis.

Nasionalisme tradisional seringkali berpatokan pada bentuk nasionalisme etnis, yaitu komitmen kepada kelompok kekerabatan dibandingkan kepada komitmen negara-bangsa. Dalam pengkajian nasionalisme etnis, Smith (1994) dalam tulisannya berjudul *Ethnic Nationalism and the Plight of Minorities* berusaha untuk membedakan dua jenis nasionalisme. Nasionalisme pertama adalah nasionalisme yang berdasarkan teritorial, sedangkan nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme yang berdasarkan etnis. Nasionalisme teritorial menganggap bangsa sebagai bentuk asosiasi rasional. Dalam versi ini, individu harus menjadi milik suatu bangsa, tetapi individu tersebut dapat memilih tempat di mana dia akan bergabung. Menurut Smith, terdapat empat fitur yang menentukan nasionalisme teritorial, antara lain: kepastian teritorial; hukum umum, undang-undang dan kesetaraan semua anggota di hadapan hukum; hak sosial dan politik kewarganegaraan; dan agama sipil serta budaya publik.

Selanjutnya, nasionalisme etnis menganggap bangsa sebagai komunitas budaya dan sejarah, dengan ikatan solidaritas yang menyerupai ikatan keluarga. Dalam versi ini, mitos leluhur tinggal di suatu tempat atau tanah air yang bersejarah dianggap sebagai kriteria keanggotaan nasional dan membutuhkan silsilah keturunan yang jelas dalam mendefinisikan bangsa etnis. Demikian pula budaya, terutama bahasa dan adat istiadat, lebih dihargai daripada kesetaraan hukum, dan mobilisasi lebih populer daripada kewarganegaraan. Akhirnya, sebagai ganti budaya sipil dan massa, nasionalisme etnis memuji sejarah asli dan budaya etnis yang lebih terbatas.

Oleh karena itu, sentimen nasionalisme etnis sangat mengandalkan sentimen primordialisme dalam upaya untuk membentuk sebuah negara. Geertz (1963) dalam tulisannya yang berjudul *The Integrative Revolution: Primordial Sentiment and Civil Politics in New State* melihat bahwa sentimen primordial menjadi faktor yang cukup erat dalam upaya untuk membangun proses *othering*, yaitu membangun sebuah negara dengan membangun perbedaan dari negara lain. Akan tetapi dalam dinamika keberagaman etnis

di dalam sebuah negara, Geertz melihat sebuah masalah penting dalam pembangunan negara baru, yaitu terjadinya *primordial attachments*. *Primordial attachments* yaitu keterkaitan akan etnisnya sendiri dan di saat bersamaan merasakan ancaman dan tidak percaya pada etnis lain. Karena pada dasarnya, beberapa etnis tertentu menghindari kemungkinan buruk dalam kontrak sosial yang membahayakan identitas dan etnis-etnis tertentu saat seluruh etnis melakukan konsensus untuk membangun tujuan bernegara.

Geertz (1963) menyebutkan *civil order* dapat menimbulkan anggapan bahwa suatu etnis akan lebih berkuasa dari etnis lain, terutama di negara-negara yang baru merdeka. Sejalan dengan pandangan Geertz, Walker Connor (1994) lebih tertarik untuk membuat perbedaan tegas antara bangsa dan negara, dua kategori yang sangat berbeda sering digabungkan dalam bahasa populer. Connor ingin membatasi penggunaan nasionalisme dan bangsa untuk apa yang disebut sebagai etnonasionalisme. Melalui definisi etnonasionalisme, pembentukan negara dapat dibatasi pada pengelompokan manusia terbesar yang didasarkan pada mitos nenek moyang yang sama.

Upaya penguatan nasionalisme etnis sering kali harus didukung oleh sistem politik yang solid pula. Menurut Brown (1997), negara-negara tidak bisa begitu saja keluar dari permasalahan penguatan etnis. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk etnosentris. Dalam penelitian yang dilakukan di Asia Tenggara, Brown melihat bahwa negara-negara di kawasan tersebut sangat bergantung terhadap sistem politik untuk membangun dan mempertahankan eksistensi negara. Menurut Brown, pengalaman otoritarian di mayoritas negara-negara Asia Tenggara dianggap dapat membatasi potensi gejolak konflik etnis yang terjadi. Dalam hal ini Brown memfokuskan etnisitas sebagai *ideological consciousness*.

Sedangkan Sidel (2012) lebih tertarik melihat bagaimana keberhasilan pembentukan negara ditentukan oleh faktor geografisnya. Melalui penelitian yang dilakukan di Asia Tenggara juga, Sidel menyimpulkan bahwa keberhasilan integrasi pembangunan suatu negara di Asia Tenggara *mainland* berbeda

dengan Asia Tenggara wilayah kepulauan. Menurut Sidel (2012), negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia merasa bahwa proses pembentukan negara-bangsa belum terbentuk secara utuh atau disebut dengan *epochalism*. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara *mainland* mampu lebih solid membangun negara-bangsa karena memiliki faktor kunci, yaitu *core ethnic*.¹ Walau memiliki beragam etnis dalam suatu negara, negara-negara Asia Tenggara *mainland* memiliki etnis utama yang berperan besar dalam pembentukan dan jalannya sebuah negara.

Perdebatan perspektif nasionalisme tercipta oleh hadirnya berbagai pemikiran yang menghindari perdebatan mengenai faktor etnis dan kultural dan mulai beralih pada faktor ide atau imaji. Apabila merujuk pada bentuk nasionalisme modern, nasionalisme tidak hadir sebagai bentuk tunggal, tetapi dikonstruksikan dalam berbagai konteks seperti peran aktor, lingkungan, hingga bagaimana anggota dalam komunitas politik mampu untuk mendefinisikan nasionalisme sesuai kebutuhan. Dalam perspektif nasionalisme modern, akar sentimen lahir sebagai ide dikarenakan pengalaman sejarah yang sama, berkomunikasi dengan cara yang sama, ekonomi, hingga kesamaan nasib. Upaya pembentukan nasionalisme akibat kesamaan nasib ini menjadi poin penting yang dijelaskan oleh pemikir penting nasionalisme seperti Ernest Renan maupun Otto Bauer.

Benedict Anderson (1992) dalam *magna opus*-nya yang berjudul *Imagined Community: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism* menekan pentingnya legitimasi emosional dalam pembentukan narasi nasionalisme. Dengan menggunakan pisau analisis materialisme historis, Anderson menjelaskan bagaimana artefak kultural berubah tiap waktunya, hingga menjadi dasar legitimasi emosional dalam elemen nasionalisme. Selain itu, Anderson menekankan pentingnya melihat bagaimana pemaknaan mengenai nasionalisme terus berubah dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya, menghasilkan legitimasi emosional

¹ Menurut Sidel (2012), nasionalisme di Pulau Asia Tenggara (yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura), telah menjadi 'epokalis' secara alami, yaitu negara yang hadir karena dibangun oleh gerakan separatis aspirasional, kreasi perjuangan politik yang dibangun, baik «bottom-up» melalui revolusi atau "top-down" melalui rekayasa sosial. Kepulauan Asia Tenggara, menganut ide nasionalisme Benedict Anderson tentang asal-usul dan penyebaran nasionalisme dalam komunitas imajiner.

yang begitu mendalam (Anderson 1992, 4). Konteks tersebut juga diperkuat oleh bagaimana kesadaran akan nilai yang sama terus tumbuh. Oleh karena itu, kekuatan dari nasionalisme dapat dilihat seiring dengan kesadaran diri untuk memaknai keterikatan sesama anggota kelompok.

Dalam mengkaji nasionalisme sebagai sebuah ide, Liah Greenfeld (1992) dalam tulisannya berjudul *Nationalism: Five Roads to Modernity* melihat bahwa masalah perbedaan budaya berkaitan erat dengan ide yang digunakan dalam membangun sebuah negara. Menurut Greenfeld, ide merupakan satu-satunya fondasi yang mampu merekatkan individu-individu dalam sebuah negara. Untuk merekatkan individu dalam sebuah komunitas politik, langkah-langkah yang dilakukan antara lain: konstruksi ide, peniruan konsep, dan membangun arah interpretasi². Sedangkan menurut Gellner (1983), nasionalisme pada dasarnya adalah prinsip politik yang menyatakan bahwa unit politik dan nasional haruslah sejalan. Sentimen nasionalis adalah perasaan emosional yang timbul karena pelanggaran prinsip atau perasaan kepuasan yang muncul dari pemenuhannya. Selain itu, berbanding terbalik dengan pemikiran nasionalisme etnis, nasionalisme adalah teori legitimasi politik yang mensyaratkan bahwa batas-batas etnis tidak boleh melintasi batas-batas politik yang telah disepakati oleh individu-individu di dalam komunitas politik.

Dalam perkembangan nasionalisme modern, nasionalisme tidak hanya dilihat sebagai bentuk sentimen semata, tetapi juga bisa dilihat sebagai bentuk ideologis. Pemaknaan nasionalisme sebagai ideologi berpengaruh pada aktor penggerak, yaitu apakah nasionalisme digerakkan oleh elite (*elite-driven*) maupun berasal

² Greenfeld (1992) menawarkan tiga langkah proses pembentukan nasionalisme. Proses ini dapat dilihat dalam beberapa tahap. Pertama, sebuah masyarakat atau komunitas membayangkan dan menamakan dirinya bangsa. Bangsa ini terdiri dari orang-orang yang merupakan sumber identitas individu, pembawa kedaulatan, objek sentral kesetiaan, dan dasar untuk solidaritas kolektif. Dengan hal tersebut, otomatis tiap identitas yang melekat pada individu dapat berganti menjadi gagasan bangsa yang baru. Oleh karena itu, negara tidak lagi hanya sebagai ide, tetapi identitas. Fase kedua yaitu ketika kelompok sosial mengimpor konsep dan mengidentifikasi dan menerapkan pada kondisi negara tempat ia tinggal. Fase ini adalah bentuk seleksi terhadap budaya yang dianggap penting sebagai materi penting *nation-building*. Ketiga adalah fase psikologis, di mana arah interpretasi sangat menentukan. Dalam proses ini, ide sebuah negara seharusnya mampu mengakomodir semua kepentingan yang berbeda dalam kelompok-kelompok di suatu negara.

dari masyarakat (*civic nationalism*). Nasionalisme hadir sebagai nilai-nilai yang ditanamkan oleh negara. Oleh karena itu, kritik perspektif nasionalisme modern terhadap nasionalisme tradisional yaitu melihat nasionalisme tidak lagi sebagai *taken for granted*. Dalam tulisan Elie Kedourie yang berjudul *Nationalism* (1961), nasionalisme adalah doktrin yang digunakan untuk membagi manusia secara alami menjadi bagian dari beberapa negara dan melegitimasi bahwa pemerintah adalah bagian sah dari mandataris kehidupan komunitas politik. Menurut Kedourie (1961), ide-ide nasionalisme telah dinaturalisasi dengan kuat dalam retorika politik Barat yang telah diambil alih untuk digunakan di seluruh dunia. Negara dalam pandangan filosofis, adalah kumpulan individu-individu yang hidup bersama untuk mengamankan kesejahteraan mereka sendiri, dan tugas para penguasa untuk mewujudkannya. Melalui doktrin ini, penguasa yang tercerahkan mengatur kegiatan ekonomi rakyatnya, memberikan pendidikan, menjaga kesehatan, hingga memberikan keadilan kepada anggota komunitasnya. Dalam fungsi nasionalisme sebagai ideologi juga, aparatur negara dianggap memiliki peran kuat untuk memproduksi dan mengendalikan ide tersebut (Tilly 1994). Hal ini terlihat dari upaya penguasa untuk berbicara atas nama suatu negara yang berhasil menuntut warga negara untuk mengidentifikasi diri kepada mereka. Atau dengan kata lain, ide nasionalisme berhasil dikapitalisasi oleh negara untuk menundukkan kepentingan lain dan lebih mengutamakan kepentingan negara. Oleh karena itu, nasionalisme mampu hadir sebagai alat pemersatu sekaligus menjadi *state subverting*. Fungsi tersebut dikendalikan penuh dalam sebuah konstruksi sosial yang konstitutif dan performatif. Nasionalisme dalam perspektif modern tidak lagi dilihat sebagai suatu yang tetap. Nasionalisme akan selalu berubah sesuai dengan konteks yang ada.

Akan tetapi, terdapat permasalahan penting dari perdebatan nasionalisme tradisional maupun modern yang sulit untuk ditampilkan. Permasalahan tersebut adalah bagaimana paradigma nasionalisme melihat kondisi dari kelompok etnis minoritas. Dalam paradigma nasionalisme etnis, masalah utama dalam pendirian sebuah negara adalah bagaimana upaya etnis mayoritas dalam memposisikan etnis minoritas, terutama terkait kebutuhan untuk mewadahi kepentingan hak minoritas. Karena pada

dasarnya, kelompok etnis mayoritas akan selalu mendefinisikan ulang, dan regenerasi anggota etnisnya untuk memolitisasi budaya nasional. Hal ini dilakukan untuk melakukan upaya homogenisasi budaya nasional. Upaya ini tentu akan berdampak langsung terhadap kelompok etnis minoritas. Bahkan dalam beberapa studi kasus, ketidak inginan kelompok etnis untuk berbaur dalam budaya nasional yang diskriminasi akan berujung pada pengusiran, bahkan pemusnahan etnis minoritas (Smith 1994). Sedangkan menurut Richmond (1984) dalam tulisannya yang berjudul *Ethnic Nationalism and Post Industrialism*, bangkitnya nasionalisme etnis sangat terkait dengan ketimpangan ekonomi global yang terjadi. Nasionalisme etnis dalam hal ini hadir untuk memperjuangkan politik pengakuan, status ekonomi, dan kondisi sosial yang lebih baik. Upaya untuk melakukan tindak separatisme maupun perlawanan didasarkan pada bentuk penuntutan atas otonomi yang lebih besar hingga kesadaran bagi etnis minoritas untuk diberikan kesempatan dalam menentukan nasibnya.

Upaya melihat permasalahan kegagalan suatu negara dalam melindungi kelompok etnis minoritas dilakukan dengan cara melihat pendekatan nasionalisme yang digunakan oleh *founding father* saat membentuk sebuah negara. Di berbagai negara dunia ketiga, sering kali kita melihat permasalahan separatisme selalu hadir dengan berbagai alasan. Dimulai dari politik pengakuan, diskriminasi rasial, hingga kesenjangan ekonomi antar etnis maupun hubungan pusat-daerah. Menurut Smith, penggunaan paradigma nasionalisme etnis dalam pembangunan negara dianggap tidak mampu untuk menjaga eksistensi dan kesejahteraan dari kelompok etnis minoritas. Elite politik negara mendefinisikan ulang, membentuk dan meregenerasi etnis dan anggotanya, etnis nasionalis memolitisasi budaya dan ditarik ke dalam pemurnian komunitas dari elemen <asing>. Hal ini menurut Smith menyebabkan pengusiran bahkan pemusnahan etnis minoritas yang dianggap sebagai «orang luar». Oleh karena itu, pembangunan ideal sebuah negara harus dengan cara melemahkan visi nasionalisme etnis, terutama untuk melindungi kelompok etnis minoritas.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan separatisme juga terjadi di negara-negara yang

mengimplementasikan ide-ide nasionalisme modern. Karena pada dasarnya, ide dan imaji *nation-building* harus disertai dengan kehendak untuk bersatu. Ketidakmampuan elite atau individu untuk mewartakan berbagai kepentingan dalam suatu ide kebangsaan akan membuat ide nasionalisme tidak berbeda jauh dari paradigma yang dimiliki oleh nasionalisme etnis. Terlebih, negara sering kali melakukan upaya untuk mempertahankan eksistensi dengan cara merepresi kelompok masyarakat yang dianggap tidak sejalan dengan visi bernegara. Oleh karena itu, modalitas sejarah penindasan dan ketimpangan ekonomi selalu menjadi masalah utama. Hal inilah yang dialami oleh Spanyol saat mempertahankan wilayahnya dari upaya pelepasan wilayah otonom seperti Basque maupun Catalunya di Spanyol, maupun negara-negara di Eropa Timur pasca bubarnya Yugoslavia dan Uni Soviet.

Dalam konteks *nation-building*, upaya pembangunan sebuah negara juga tidak terlepas dari bagaimana negara-negara dunia ketiga melakukan proses peniruan. Pemikir-pemikir poskolonial sering kali melihat upaya penyeragaman *nation-state* dalam kacamata kuda bernama *Eurocentrism*. Pemikir poskolonial, Edward Said melihat bahwa pemikiran di luar Eropa sebagai bentuk *primitive others* dan dianggap tidak sesuai standar yang ada. Oleh karena itu, sering kali negara-negara penjajah menancapkan budaya dan bahasa mereka sehingga membuat budaya, nilai hingga sejarah asli negara jajahan terlupakan, bahan dirusak dengan tujuan untuk menguasai populasi dan sumber daya dengan menggunakan jargon tertentu seperti *enlightening*, *civilizing*, hingga *humanizing* (Said 1978).

Pemikir poskolonial lainnya, Partha Chatterjee melihat bahwa upaya untuk mengadopsi dan meniru proses pembentukan negara-bangsa pada akhirnya juga merugikan negara-negara dunia ketiga. Imaji dan ide pembangunan negara seringkali terhegemoni oleh negara-negara Barat tanpa melihat secara kontekstual apa yang dibutuhkan oleh negara-negara dunia ketiga. Kritik utama Chatterjee adalah apabila semua negara di Asia dan Afrika mengimplementasikan komunitas imajiner mereka dalam bentuk modular yang telah disediakan oleh Eropa dan Amerika, apa yang tersisa untuk mereka bayangkan? (Chatterjee 1993, 5). Sejarah

telah membuktikan bahwa negara pasca kolonial hanya menjadi konsumen modernitas abadi dari ide-ide Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, negara tersebut menjadi satu-satunya subjek sejarah sejati. Berbicara nasionalisme anti kolonial akan selalu berjalan beriringan dengan perlawanan melawan kolonialisme dan kesengsaraan atas dampak penjajahan. Oleh karena itu, Chatterjee melihat bahwa imajinasi negara dunia ketiga akan terus terjajah selamanya.

Sedangkan menurut Ling dalam tulisannya yang berjudul *Cultural Chauvinism and the Liberal International Order: 'West versus Rest' in Asia's Financial Crisis* menyatakan bahwa pasca-penjajahan, negara-negara bekas jajahan melakukan *substantive mimicry*, di mana penyelenggaraan negaranya—dan dalam makna yang lebih luas, penyelenggaraan hubungan kuasa—menjadi terhipermaskulinisasi dan penuh kekerasan. Di tulisannya yang lain, Han dan Ling (2002) menyatakan bahwa *agency* rakyat, terutama perempuan, dibatasi secara besar-besaran di bawah nasionalisme hasil mimikri. Mimikri yang dimaksud adalah peleburan nilai-nilai kolonial dengan nilai-nilai asli dari negara terjajah sehingga menghasilkan konsep nasionalisme yang baru.

Sejalan dengan Said, pemikir poskolonial lainnya yaitu Sankaran Krishna juga melihat bahwa upaya pembentukan negara modern di negara-negara dunia ketiga sangat terkait dengan faktor-faktor yang terjadi di negara-negara Barat. Krishna (1999) mengenalkan istilah *postcolonial anxiety*, yaitu bagaimana golongan elite dan kelas menengah terpelajar mengonstruksikan masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Eropa (Krishna 1999). Untuk memenuhi tuntutan konstruksi tersebut, Krishna juga mencetuskan istilah penting dalam *postcolonial anxiety*, yaitu *postcolonial engagement*. *Postcolonial engagement* adalah kebutuhan negara-bangsa untuk melakukan dekonstruksi, penataan sejarah, dan denaturalisasi identitas dalam rangka menciptakan sistem politik untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perdebatan di antara paradigma nasionalisme menjelaskan bagaimana nasionalisme hadir dalam pembentukan sebuah negara. Dalam paradigma nasionalisme tradisional, aspek etnis

menjadi elemen penting. Nasionalisme hadir sebagai bentuk *taken for granted*, dihadirkan melalui bentuk pemurnian kekerabatan, hingga berusaha untuk melakukan proses *othering* terhadap etnis-etnis lainnya. Dalam berbagai literatur, nasionalisme Papua dilihat sebagai bentuk nasionalisme etnis. Di mana, individu dalam komunitas politik tersebut mengaitkan upaya bersatu melalui kesamaan warna kulit, bentuk tubuh, hingga aspek-aspek kultural lainnya. Sedangkan nasionalisme Indonesia hadir sebagai bentuk pemaknaan ide bersatu akibat kesamaan nasib, keinginan untuk bersatu, dan didukung oleh identifikasi kesatuan teritorial.

Akan tetapi, konsekuensi dari paradigma nasionalisme modern adalah tidak ada bentuk nasionalisme yang baku. Nasionalisme akan selalu berubah seiring dengan konteks. Dalam hal ini, nasionalisme akan ditentukan oleh elite negara yang dikelola oleh pemerintah. Menggunakan istilah *postcolonial anxiety* yang digagas oleh Sankaran Krishna, elite Indonesia berusaha untuk memenuhi tuntutan konstruksi nasionalisme yang dilakukan oleh Eropa. Elite berusaha melakukan dekonstruksi penataan sejarah dan denaturalisasi identitas untuk menjamin keberlangsungan nasionalisme Indonesia.

Permasalahan utama dalam adaptasi *nation-building* yang dilakukan oleh elite Indonesia adalah kegagalan pendekatan tersebut untuk memahami karakteristik keberagaman dalam sebuah komunitas politik. Ling menyatakan bahwa *substantive mimicry* yang dilakukan sebuah elite negara sering kali melakukan hipermaskulinitas terhadap etnis-etnis minoritas. Sedangkan Chatterjee melihat bahwa upaya peniruan model *nation-building* negara Eropa seringkali berdampak oleh kegagalan negara dalam mewadahi kepentingan etnis minoritas.

Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia memiliki permasalahan penting terkait upaya penghormatan terhadap kelompok etnis minoritas Papua. Pemaknaan nasionalisme Indonesia yang sempit di kalangan elite menjadi tantangan sendiri dalam mengakui hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat Papua. Di sisi lain, nasionalisme Papua kini tidak hanya mampu dijelaskan oleh faktor nasionalisme etnis. Lebih dari itu, upaya diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia menjadikan ide-ide nasionalisme Papua semakin menguat. Penguatan tersebut hadir dikarenakan kesamaan nasib akibat tindakan diskriminasi rasial, aksi represif pemerintah Indonesia, hingga kurangnya upaya penghargaan terhadap hak sipil politik dan sosial ekonomi masyarakat Papua.

Simpulan

Dalam studi HI, Perjanjian Westphalia telah mengukuhkan bagaimana keterkaitan antara negara-bangsa dengan kedaulatan. Perjanjian Westphalia telah membuktikan bahwa negara-bangsa telah menjadi bagian penting elemen pembentuk kedaulatan melalui kehadiran masyarakat, batas teritorial yang tetap, hingga elite yang berkuasa. Dalam konsep nasionalisme dalam studi HI *mainstream*, Perjanjian Westphalia membuat gagasan nasionalisme menjadi suatu hal yang sifatnya final. Akan tetapi dalam perkembangan diskursusnya, nasionalisme bukan sesuatu yang bermakna tunggal dan hadir sebagai bentuk *taken for granted*. Dalam perspektif nasionalisme modern, nasionalisme dilihat sebagai bentuk konstruksi sosial yang tidak sempurna atau tetap. Nasionalisme akan berubah sesuai dengan konteks ada dan akan selalu ditantang dari dalam maupun dari luar.

Dalam kajian nasionalisme modern, sebuah negara dianggap membawa ide-ide persatuan yang menyelaraskan kepentingan berbagai kelompok. Ide-ide tersebut dianggap menciptakan sebuah negara yang tidak lagi mempermasalahkan perbedaan etnis, tetapi fokus pada penyatuan imaji dalam payung komunitas politik yang tetap. Akan tetapi, fenomena pasca Perang Dingin yang terjadi adalah eksistensi negara ditantang oleh kelompok-kelompok separatis berbasis etno-religius. Oleh karena itu paradigma nasionalisme modern yang diterapkan dalam studi HI mendapatkan kritik yang cukup tajam seiring dengan meningkatnya konflik etnis yang terjadi di berbagai negara. Dalam perspektif nasionalisme modern juga, sentimen nasionalisme hadir dikarenakan kesadaran di antara anggota komunitas politik terhadap perjuangan-perjuangan yang harus dihadapi. Semisal, negara dunia ketiga akan membangun sentimen

nasionalisme dengan menyuarakan semangat anti kolonialisme dan imperialisme. Hal ini sering terjadi di negara-negara yang terletak di Asia dan Afrika. Kondisi yang terjadi mengakibatkan bergesernya orientasi pembentukan nasionalisme yang dikelola elite. Tetapi pada saat ini, nasionalisme juga bisa ditentukan atas kehendak rakyat.

Walaupun negara-negara dunia ketiga hadir melalui narasi antikolonialisme nilai-nilai barat dalam perjuangannya, proses peniruan model negara bangsa dengan mengacu pada negara-negara barat tetap terus berjalan. Karena pada dasarnya, tidak satu pun metode yang bisa diciptakan bagi negara dunia ketiga untuk membangun narasi *nation-building* itu sendiri. Proses peniruan tersebut pada akhirnya juga menciptakan kondisi turunan, yaitu negara dunia ketiga yang sudah memiliki kedaulatan pada akhirnya enggan atau resisten terhadap tuntutan *self determination* yang dilakukan oleh kelompok minoritas etnis maupun kelompok separatis yang ingin melepaskan diri. Hal tersebut terjadi karena negara dunia ketiga menganggap bahwa kelompok separatis tersebut adalah bagian dari negara-bangsa yang telah disepakati dan dianggap sebagai bentuk final.

Karena batas negara diciptakan kolonial, maka negara baru merasa bahwa seluruh bagian dari negara tersebut adalah kedaulatan yang dilegitimasi oleh semangat nasionalisme. Akan tetapi, tidak sedikit fenomena yang memperlihatkan bahwa beberapa kelompok etnis tertentu tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap batas yang telah ditetapkan dan meminta *self determination*. Menurut kelompok etnis minoritas yang menginginkan *self determination*, batas-batas teritorial ini tidak membuat mereka menjadi bagian dari satu entitas negara-bangsa. Akan tetapi, negara dunia ketiga sulit menerima kondisi tersebut hingga pada akhirnya, sering kali kekerasan menjadi solusi utama dalam meredam gerakan *self determination*. Kekerasan tersebut sejatinya lahir dari cara pandang nasionalisme yang dikonstruksikan oleh elite. Di mana, elite di suatu negara mengukuhkan nilai nasionalisme sebagai sesuatu yang final. Oleh karena itu, keinginan *self determination* akan selalu dikaitkan dengan tindakan subversif dari konsep negara. Persoalan ini menjadi problem negara yang tidak pernah berhenti sampai hari ini.

Kesimpulan di atas dapat menjelaskan kondisi nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Berkaca dari perspektif nasionalisme dalam HI, negara-bangsa adalah sesuatu yang final. Atas dasar kedaulatan, elite negara memiliki hak seutuhnya untuk menafsirkan nasionalisme. Oleh karena itu, kita sering mendengar elite Indonesia mengumandangkan “NKRI harga mati”, sebuah slogan yang menyatakan bahwa keindonesiaan sudah final. Akan tetapi, upaya finalisasi tersebut nyatanya tidak menyelesaikan permasalahan mendasar, terutama terkait hak dan pengakuan kelompok minoritas. Upaya finalisasi berdampak pada tidak terciptanya metode-metode dialogis dan demokrasi dalam menyelesaikan permasalahan separatis dan lebih memilih menggunakan tindak kekerasan yang berpotensi melanggar HAM.

Indonesia lahir akibat ketidakadilan kolonialisme di masa penjajahan. Dengan menggunakan sentimen nasionalisme, para *founding father* berusaha menyatukan berbagai masyarakat Indonesia dalam semangat perjuangan melawan penjajah. Tetapi pertanyaan penting adalah apakah semangat tersebut mampu menyebar ke dalam imaji masyarakat Papua? Dalam pembacaan berbagai literatur, tidak ditemukan nilai nasionalisme Indonesia sebagai penggerak masyarakat Papua dalam melawan Belanda. Selain itu, berbagai literatur menyatakan bahwa nasionalisme Papua lahir terlebih dahulu dipengaruhi oleh faktor etnisitas.

Apabila Indonesia menegaskan finalisasi nasionalisme dalam menghadapi *self determination* Papua, lalu apakah yang membedakan Indonesia dengan negara penjajah lainnya yang berusaha untuk merepresi setiap langkah *self determination* negara yang dijajahnya? Oleh karena itu, Indonesia harus membuka ruang dialogis dalam asas demokrasi untuk memahami nasionalisme Papua dan motif dari *self determination* tersebut. Ruang dialog menjadi penting sebagai upaya elite Indonesia dan masyarakat Papua menyatukan visi bernegara. Setiap gerakan *self determination* harus dimaknai bukan sebagai tindak subversif, tetapi menjadi refleksi bahwa terdapat kondisi ketidakadilan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pada masyarakat Papua. Diskriminasi, kebijakan rasis, hingga pengucilan dari kelompok masyarakat mayoritas adalah faktor-faktor yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Penghargaan atas hak

kelompok minoritas Papua dilakukan dengan cara memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk mengekspresikan pendapatnya, menjamin pemerataan pembangunan, pemberian otonomi khusus yang dilandasi oleh *political will* pemerintah Indonesia, hingga menjamin setiap langkah-langkah yang akan dipilih oleh masyarakat Papua di masa depan.

Referensi

Buku dan Bab dalam Buku

- Anderson, Benedict, 1992. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Bauer, Otto, 2000. *The Question of Nationalities and Social Democracy*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Breuilly, John, 2014. "Nationalism" dalam Baylis, J & Smith, S (eds.), *The Globalization of World Politics, 6nd edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Brown, E (ed.), 1997. *Nationalism and Ethnic Conflict*. Massachusetts: MIT Press.
- Chauvel, Richard, 2005. *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, And Adaptation*. Washington D.C: East-West Center.
- Chatterjee, Partha, 1993. *The Nation and Its Fragments*. New Jersey: Princeton University Press.
- Connor, Walker, 1994. *Ethnonationalism: The Quest for Understanding*. New Jersey: Princeton University Press.
- Drooglever, P.J., 2009. *An Act of Free Choice: Decolonization and the Right to Self-Determination in West*. New York: Oneworld Publications.
- Geertz, Clifford (ed.), 1963. *Old Societies And New States: The Quest For Modernity In Asia And Africa*. London: Collier-Macmillan.
- Gellner, Ernest, 1983. *Nation and Nationalism*. Ithaca: Cornell University Press.

- Giay, Benny, 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Elsham Papua
- Greenfeld, Liah, 1992. *Nationalism: Five Roads to Modernity*. New York: Harvard University Press.
- Kedourie, Elie, 1961. *Nationalism*. London: Hutchinson University Library.
- Krishna, Sankaran, 1999. *Postcolonial Insecurities: India, Srilanka, and the Question of Nationhood*. London: University of Minnesota Press.
- Ling, LHM, 2002. "Cultural Chauvinism and the Liberal International Order: 'West versus Rest' in Asia's Financial Crisis" dalam Chowdry, G & Nair, S (ed.), 2020. *Power, postcolonialism and international relations: Reading race, gender, and class*. London: Routledge.
- Meteray, Bernarda, 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Norotouw, John Al, 2012. *Save our Papua: Indonesianisasi vs Papanisasi*. Jakarta: Cergas Media.
- Said, Edward, 1978. *Orientalism*. London: Routledge & Kegan Paul

Jurnal dan Jurnal Daring

- Han, J. dan L.H.M Ling, 2002. "Authoritarianism in the Hypermasculinized State: Hybridity, Patriarchy, and Capitalism in Korea", *International Studies Quarterly*, **42**: 53-78.
- Richmond, Anthony, 1984. "Ethnic Nationalism And Post Industrialism", *Ethnic and Racial Studies*, **7**:1, 4-18.
- Sidel, John, 2012. "The Fate Of Nationalism In The New States: Southeast Asia, *Comparative Historical Perspective*," *Comparative Studies In Society And History*, **54** (01):114-144
- Smith, Anthony, 1994. "Ethnic Nationalism and the Plight of

- Minorities”, *Journal of Refugee Studies*, 7(2-3): 186-198.
- Tilly, Charles, 1994. “States and Nationalism in Europe 1492-1992”, *Theory and Society*, 23(1): 131-146.
- Kang, Hyunji. 2018. “Investigating Multiple Citizenship in International Relations: Rethinking Globalisation, Nation-States and Social Contract”, *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(1): 15-37.
- Wardhani, Baiq, 2015. “Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?”, *Global Strategis*, 9(2): 190-206.

Dokumen Resmi

- Eluay, Theys Hiyo, 1999. “Pidato Dekrit Papua Merdeka 1 Desember 1999”. Jayapura.
- Soekarno, 1945. “Pidato Lahirnya Pancasila, Sidang BPUPKI 29 Mei-1 Juni 1945”. Jakarta.

Artikel Daring

- Anderson, Benedict, 1999. “Indonesia Nationalism Today and in The Future” [daring]. dalam https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/54161/INDO_67_0_1106955613_1_12.pdf?sequence=1 [Diakses pada 29 Juni 2020].
- Renan. Ernest, 1882. “What is a Nation?” [daring]. dalam <https://www.polskawalczaca.com/library/What%20Is%20A%20Nation.pdf> [Diakses pada 8 Februari 2021].

